

**PERKEBUNAN LADA DI BANTEN TAHUN 1805-1816**

**JURNAL**



Oleh :  
Hardiman  
11407144006

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRACT

### PEPPER PLANTATION IN BANTEN 1805-1816

By: Hardiman  
NIM. 11407144006

Banten sultanate is one important area where pepper. Pepper when it is a spice that is the main commodity Sultanate of Banten in the International market. After foreigners started to enter the territory of Banten, pepper plantation management to follow the system of foreign nations which occupied the territory of the Sultanate of Banten. Pepper plantations in Banten have ups and downs due to the influence of the colonizers. The purpose of this paper which outlines the general condition of Banten, Banten outlines the plantation system in 1805-1816, as well as outlining the problems pepper plantations in Banten.

Research methods used in this research, critical historical method, with the following stages heuristics, criticism of sources, interpretation, and historiography, or the writing. Heuristics is a search for the sources of primary and secondary. Criticism source is a source of testing and analyzing critically about the authenticity and credibility of the sources that have been collected. Interpretation is the interpretation of the facts obtained and connect the relevant facts so that it becomes meaningful. Historiography is the writing of research results in the form of writing history.

Banten is a region located at the tip of Java Island. The main commodities in Banten, pepper, coffee, and rice. Pepper plantations can not be separated from the west, such as the VOC, the Dutch and the British. When the VOC was in Banten, originally only as trading partners, but the longer the VOC get the pepper trade monopoly in Banten, which was originally held by the empire. Unlike when the Government of the Netherlands, Daendels implement forced collection system for plantation crops and also apply hard labor for construction. Followed by England, Raffles change forced voting and forced labor, and then replaced with the freedom to grow and replace the new administration. Pepper plantations during the Dutch and British losses in production. Pepper production decline due to the change of political power from the Netherlands to England to replace the primary commodity of pepper into coffee, and due to the condition of land used for growing the pepper is damaged and can not be used for growing pepper.

Keywords: Plantation, Pepper, Banten

## ABSTRAK

### PERKEBUNAN LADA DI BANTEN 1805-1816

Oleh: Hardiman  
NIM. 11407144006

Kesultanan Banten merupakan salah satu wilayah penting penghasil lada. Lada pada saat itu merupakan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama Kesultanan Banten di pasaran Internasional. Setelah bangsa asing mulai memasuki wilayah Banten, pengelolaan perkebunan lada mengikuti sistem dari bangsa asing yang menduduki wilayah Kesultanan Banten. Perkebunan lada di Banten mengalami pasang surut yang dikarenakan pengaruh pihak penjajah. Tujuan dari penulisan ini yaitu menguraikan kondisi umum Banten, menguraikan sistem perkebunan Banten pada tahun 1805-1816, serta menguraikan permasalahan perkebunan lada di Banten.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode sejarah kritis, dengan tahapan sebagai berikut heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan. Heuristik merupakan pencarian sumber-sumber primer maupun sekunder. Kritik sumber merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta yang diperoleh dan menghubungkan fakta-fakta yang terkait sehingga menjadi bermakna. Historiografi adalah penulisan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis sejarah.

Banten merupakan wilayah yang terletak di paling ujung Pulau Jawa. Komoditas utama di Banten yaitu lada, kopi, dan padi. Perkebunan lada tidak bisa terlepas dari pihak barat, seperti VOC, Belanda dan Inggris. Ketika VOC berada di Banten, semula hanya sebagai kongsi dagang, akan tetapi semakin lama VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan lada di Banten yang semula di pegang oleh pihak kesultanan. Berbeda halnya dengan ketika Pemerintahan Belanda, Daendels menerapkan sistem pemungutan paksa terhadap hasil perkebunan dan juga menerapkan kerja rodi untuk pembangunan. Dilanjutkan dengan Inggris, Raffles merubah pemungutan paksa dan kerja paksa, kemudian digantikan dengan kebebasan dalam menanam serta mengganti sistem administrasi yang baru. Perkebunan lada pada masa Belanda dan Inggris mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi lada dikarenakan adanya pergantian kekuasaan politik dari Belanda ke Inggris yang mengganti komoditas utama dari lada menjadi kopi, dan disebabkan kondisi tanah yang digunakan untuk menanam lada mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai untuk menanam lada.

Kata Kunci: *Perkebunan, Lada, Banten*

## A. Pendahuluan

Kedatangan pihak asing ke Nusantara pada awalnya bertujuan mencari negeri penghasil rempah-rempah, untuk kemudian membeli rempah-rempah lalu diperdagangkan di pasaran eropa. Melihat keelokan bumi Nusantara dengan kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda, pihak asing pun lantas berkeinginan untuk menguasai Nusantara. Berdagang tidak lagi menjadi fokus utama, tetapi mereka lebih memutuskan perhatian untuk melakukan penguasaan atas setiap daerah yang mereka singgahi.

Letak Banten yang berada di jalur perdagangan internasional, diduga sudah memiliki hubungan dengan dunia luar sejak abad pertama masehi. Kemungkinan pada abad ke-7 Banten sudah menjadi pelabuhan yang dikunjungi para saudagar dari luar. Banten menjelang terbentuknya kerajaan bercorak Islam masih merupakan salah satu daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang terletak di pesisir utara bagian barat. Daerah ini berada di bawah pimpinan seorang adipati yang ditempatkan di Bandar Banten dengan kotanya di tepi sungai.

Bersumber dari berita Tome Pires yang pernah menyelusuri pesisir utara Jawa, dari berita itu dijelaskan bahwa Banten sebagai bandar yang amat penting menjadi perhatian bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Ini berarti Bandar Banten sudah termasuk jaringan jalan sutra, mengingat letak geografisnya yang baik bagi lalu lintas pelayaran dan perdagangan baik antar daerah atau kerajaan di Nusantara maupun bagi pelayaran dan perdagangan antar bangsa.

Pusat perdagangan dan perkebunan lada di Pulau Jawa yang terbesar adalah Banten. Pada abad ke-16 aktivitas perdagangan lada telah menarik banyak pedagang mancanegara. Dalam laporan Tome Pires (1513), Banten digambarkan sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda.<sup>1</sup> Kesaksian Tome Pires dapat dijadikan petunjuk bahwa Bandar Banten sudah berperan sebelum berdirinya Kesultanan Banten.

Berdasarkan berita Tome Pires tahun 1513, Kerajaan Sunda memiliki enam pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang, pelabuhan-pelabuhan itu adalah Kelapa, Cimanuk, Banten, Pontang, Cigede, dan Tanggerang.<sup>2</sup> Semua pelabuhan tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda yang terletak di wilayah Banten sekarang. Barang-barang dagangan yang menjadi komoditas utama berupa bahan makanan, beras, dan lada. Pada masa itu, lada merupakan bahan rempah yang sangat diminati oleh orang-orang di Benua Eropa, sehingga para pedagang asing berdatangan ke kawasan penghasil lada di Nusantara. Lada yang dikeluarkan dari Pelabuhan Banten selain dihasilkan dari perkebunan di Banten sendiri, juga diproduksi di perkebunan lada di wilayah kekuasaan Banten di Pulau Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Bengkulu.<sup>3</sup>

Dengan hak monopoli yang dimilikinya Kesultanan Banten berhasil menguasai perdagangan lada di Sumatra bagian Selatan. Karena inilah Pelabuhan

---

<sup>1</sup> Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, Cet I, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 26.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>3</sup> Ery Soedewo, "Lada Si Eman Panas: Dampaknya Bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten", *Jurnal*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007), hlm. 20.

Banten menjadi salah satu pusat perdagangan laut yang hampir menggantikan kedudukan Malaka, yang telah jatuh ke Portugis.<sup>4</sup> Dampak langsung dari meningkatnya permintaan lada oleh pasar luar negeri adalah timbulnya persaingan antar para pedagang asing, sehingga masing-masing berusaha untuk memperkuat posisinya dengan bermacam cara. Misalnya VOC, berusaha mempengaruhi Sultan Banten agar mendapatkan hak monopoli perdagangan lada.

Para pedagang dari Cina tidak lagi menunggu kedatangan petani lada di pasar, tetapi langsung ke kebun lada di pedalaman. Kedudukan Banten sebagai produsen lada dan pemegang monopoli perdagangan mulai mengalami kemunduran setelah memasuki pertengahan abad ke 17 Masehi. Hal ini disebabkan terjadinya pertentangan politik dikalangan keluarga sultan yang memperebutkan tahta.

Dalam pertentangan ini, putra mahkota Kesultanan Banten yang merangkap sebagai sultan muda Banten mencari dan meminta bantuan kepada VOC, ia menawarkan imbalan kepada VOC, kalau ia berhasil menduduki tahta Kesultanan Banten, maka VOC akan memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Banten. Tahun 1682, hak monopoli itu diperoleh VOC yang ditandai dengan diusirnya para pedagang non Belanda yang singgah di Pelabuhan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Aliuddin, kompeni mewajibkan rakyat Banten yang berumur lebih dari 16 tahun dan berbadan sehat, untuk menanam 500 batang pohon lada.<sup>5</sup> Hasilnya harus dijual kepada kompeni melalui petugas

---

<sup>4</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 79

kerajaan yang ditunjuk. Pembayaran yang digunakan dengan melalui barter dengan barang kebutuhan pokok yang diragakan sangat tinggi sementara harga lada satu *bahar*<sup>6</sup> (tiga pikul) hanya dihargai kurang dari empat ringgit Spayol.<sup>7</sup> Dengan cara demikian rakyat hampir tidak memperoleh untung sama sekali. Pada tahun 1774 kompeni dari hasil kerja pakasanya dapat mengirim 19.000 *bahar* lada ke negerinya.

Ketika pemerintahan Sultan Aliuddin berakhir, tahta beralih ke tangan Pangeran Muhiddin. Pada saat itu pula tanggal 31 Desember 1799 kompeni dagang VOC dibubarkan dan kekuasaanya diambil alih Pemerintah Kerajaan Belanda. Gubernur Jendral H.W. Daendels merupakan gubernur pertama di Hindia Belanda. Kebijakan pertama yang dikeluarkan adalah kerja rodi untuk rakyat pribumi dan pungutan paksa bagi penduduk pribumi. Pada masa Daendels perkebunan lada di Banten mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Hal tersebut dikarenakan Daendels lebih memusatkan kepada perkebunan kopi.

Setelah Belanda kalah dari Inggris, Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Raffles mengubah sistem pungutan paksa menjadi sistem pungutan pajak tanah. Dengan cara ini rakyat dibebaskan dari segala unsur paksaan, dan sebaliknya rakyat diberi, baik dalam menentukan tanaman-tanaman yang dikehendaki

---

<sup>6</sup> Bahar merupakan Satuan ukuran berat, 3 bahar =1 pikul

<sup>7</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*

maupun dalam menentukan penggunaan hasil panenanya.<sup>8</sup> Kebijakan ini juga mempengaruhi perkebunan lada di Banten. Selain itu juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Banten.

## B. Gambaran Umum Banten Abad ke 19

Banten yang terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, luasnya sekitar 114 mil persegi.<sup>9</sup> *Karisidenan* Banten dibagi menjadi empat *residen* yaitu, *residen* Tangerang dengan luas 1.282,22 Km<sup>2</sup>, *residen* Serang yang luas 1.840,75 Km<sup>2</sup>, *residen* Lebak yang luas 2.198,78 Km<sup>2</sup>, dan *residen* Pandeglang dengan luas 2.198,78 Km<sup>2</sup>.<sup>10</sup> Pada bagian barat dibatasi oleh Selat Sunda, sebelah timur dibatasi Sungai Cikandi, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Hindia, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Secara geografis, wilayah Banten di bedakan menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan daerah dataran rendah.<sup>11</sup> Daerah dataran tinggi terletak di daerah Banten bagian barat dan selatan atau di daerah Katemenggungan, Menes, Lebak, dan Jasingan. Daerah ini cocok untuk ditanami lada. Sedangkan di daerah dataran rendah merupakan daerah pertanian padi. Daerah ini sangat subur karena dapat air dari Sungai Ciujung dan Cikandi.

---

<sup>8</sup> Mubyarto dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 18-19.

<sup>9</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Cet. I, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 53.

<sup>10</sup> Sri Ika Faika, "Peran Jawara Dalam Peristiwa Geger Cilegon di Banten Tahun 1870-1888", *Skripsi*, (Yogyakarta UNY, 2005), hlm. 26.

<sup>11</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 61.

Penduduk Banten mayoritas adalah pemeluk agama islam. Lapisan masyarakat yang disegani dan dihormati oleh penduduk adalah golongan ulama dan kyai. Di Banten ada dua macam ulama yaitu, pertama ulama yang diangkat dan digaji oleh pemerintah yaitu penghulu dan pegawainya, kedua adalah golongan ulama yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mendapat predikat sebagai kyai dan guru ngaji.<sup>12</sup> Masyarakat Banten terbagi kedalam beberapa golongan yaitu golongan raja dan keluarganya, golongan elite, golongan nonelite, dan golongan budak.<sup>13</sup>

Masyarakat yang menempati lapisan menengah adalah mereka yang termasuk kedalam golongan elit. Di Banten mereka dikenal dengan sebutan priyayi yang ditunjukkan untuk menyebut kelompok-kelompok pegawai pangreh raja yang harus memiliki kriteria tertentu, termasuk kebangsawanan. Golongan elite membedakan dirinya dari lapisan atau golongan nonelite bukan karena kehidupan ekonominya saja, melainkan berkaitan dengan kehidupan sosial budayanya. Misalnya, mereka mempunyai corak atau gaya berpakaian sendiri, cara berbahasa, gelar-gelar yang dimilikinya, rumah-rumahnya mempunyai bentuk serta keadaan yang berbeda dengan orang golongan nonelite.

Dua lapisan sosial lainnya ditempati oleh golongan nonelite dan budak. Dalam lapisan sosial masyarakat Banten, golongan nonelite ini merupakan golongan masyarakat yang paling besar jumlahnya. Mereka terdiri dari pedagang,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>13</sup> Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, (Serang: Saudara, 1993), hlm. 22

petani, pekerja ahli atau tukang, nelayan, pegawai pemerintah bagian bawah, agamawan yang melayani orang-orang biasa, anggota tentara dan lainnya yang belum masuk ke dalam kriteria golongan ini.

Pada saat itu pula, tanggal 31 Desember 1799, kompeni (VOC) dibubarkan. Kekuasaanya diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, yang membentuk Pemerintahan Hindia Belanda. Daendels membagi Pulau Jawa ke atas Sembilan *prefektur*, setiap *prefektur* dipimpin oleh seorang *prefek*. Istilah ini kemudian dirubah menjadi *landdrostambt*. Konsep Daendels dalam pembagian Pulau Jawa, selain didasarkan pada pemerintahan sentralistis, juga dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan yakni, Tugas utama Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan Inggris, musuh utama Napoleon, kecilnya jumlah pegawai tinggi sipil di Hindia Belanda, terbatasnya keuangan Negara Kolonial.

Pada bulan Mei 1811 beliau digantikan oleh Gubernur Jendral van Willem Janses. Akan tetapi, Jansen tidak berkuasa lama karena ia tidak mampu mengatasi serbuan armada Inggris ke Pulau Jawa. Akibatnya tanggal 17 September 1811 ia menyerah kepada Inggris di Salatiga melalui kapitulasi tuntutang.<sup>14</sup> Sejak itu, kekuasaan Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa jatuh ke pihak Inggris yang diwakili oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada pemerintahan Inggris istilah *prefektur* digantikan menjadi *karisidenan*, dan istilah *prefek/landrostambt* pun diganti menjadi residen. Raffles juga memperkenalkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

jabatan baru dalam pemerintahan yaitu *asisten residen*, dan jabatan wedana yang mengepalai distrik. Pada dasarnya Raffles mengikuti konsepsi Daendels dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Daendels pada umumnya dinyatakan tetap berlaku.

### C. Pengaruh Barat Dalam Sistem Perkebunan Lada Di Banten

Sebelum VOC datang, bangsa Portugis sudah lebih dulu memasuki kawasan Banten. Orang-orang Portugis ingin menguasai perkebunan lada di Banten. Usaha tersebut terlihat ketika Portugis meminta haknya untuk membangun benteng pertahanan di wilayah Kesultanan Banten. Dalam pembangunan benteng pertahanan ini Portugis meminta Kesultanan Banten untuk membiayai biaya pembangunan benteng dalam bentuk subsidi tahunan sebanyak 1000 karung lada atau sama dengan 30 ton lada. Selain itu, Portugis meminta Kesultanan Banten untuk menjual hasil produksi lada kepada Portugis.

Kedudukan Banten sebagai produsen lada dan pemegang hak monopoli perdagangan mulai mengalami kemunduran setelah memasuki pertengahan abad ke 17 Masehi. Hal ini disebabkan terjadinya pertentangan politik di kalangan keluarga sultan yang merebutkan tahta. Putra Mahkota Kesultanan Banten yang merangkap sebagai sultan muda Banten mencari dan meminta bantuan kepada VOC, beliau menawarkan imbalan kepada VOC. Jika berhasil menduduki Kesultanan Banten maka VOC akan mendapatkan hak monopoli perdagangan lada di Banten. Tahun 1682 hak monopoli itu diperoleh VOC yang ditandai dengan diusirnya para pedagang non Belanda yang singgah di Pelabuhan Banten.

Pergantian politik pemerintahan VOC ke Pemerintahan Hindia Belanda pada peralihan abad ke 18 sampai abad ke 19. Perpindahan politik pemerintahan ditandai dengan kebangkrutan VOC yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya yaitu kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli dan sistem paksa yang membawa kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan penduduk. Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, kekuasaan Banten diambil alih kembali oleh Belanda.

Pemerintah Belanda di Banten dan wilayah nusantara dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendels yang memimpin dari tahun 1808 hingga 1811. Dalam kurun waktu tiga tahun Daendels tidak bisa memperbaiki keadaan perkebunan di Banten dan wilayah nusantara. Pungutan paksa terhadap hasil perkebunan yang diterapkan oleh Daendels kepada rakyat pribumi semakin memberatkan beban rakyat pribumi. Daendels juga menerapkan kerja rodi untuk pembangunan berbagai sarana seperti jalan, bangunan pertahanan, dan lain-lain. Contoh dari bangunan pertahanan yaitu pada saat Daendels memimpin Daendels bermaksud untuk membangun sebuah pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon.

Sama halnya dengan Daendels, Raffles yang mewakili penguasa Pemerintahan Inggris di Indonesia, hendak melaksanakan sistem liberal dan dasar-dasar humanitarisme. Secara radikal Raffles juga hendak melancarkan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan barat dan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa dan kerja paksa hendak dihapuskan. Penduduk akan didorong untuk melakukan kebebasan bercocok tanam dan berdagang, dan kekuasaan bupati

dibatasi kekuasaannya, yaitu sebagai pegawai pemerintahan yang bertugas sebagai pemungut pajak.

Pada tahun 1813, Raffles melakukan perubahan dengan membagi wilayah Banten dari tiga daeah menjadi empat daerah. Masing-masing daerah dipimpin oleh seorang bupati. Keempat daerah tersebut yakni, Kabupaten Banten Lor diperintah oleh Pangeran Suramenggala, Kabupaten Banten Kulon dipimpin oleh Bupati Tubagus Hayudin, Kabupaten Banten Tengah diperintah oleh Bupati Tubagus Ramlan, dan Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan) dipimpin oleh Bupati Tumenggung Suradilaga.

#### D. Pengaruh Kondisi Pertanahan Dan Politik Terhadap Perkebunan Lada

Di dalam masyarakat agraris, tanah mempunyai arti penting di dalam kehidupan penduduk. Tanah, diartikan sebagai sawah dan ladang yang menjadi sumber kehidupan penduduk walaupun tidak mutlak. Di Banten, tanah juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah pertanian dan pekarangan. Tanah pertanian (ladang dan sawah) digunakan untuk bercocok tanam, sedangkan pekarangan digunakan untuk tempat tinggal atau bangunan.<sup>15</sup>

Pemilik tanah di Kesultanan Banten dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pemilikan tanah yang bersifat komunal dan individu. Sistem pemilikan tanah yang bersifat komunal adalah kepemilikan tanah yang tertua di Kesultanan Banten yang dimaksud adalah sawah dan ladang, milik bersama

---

<sup>15</sup> Sudarno, "Kesultanan Banten di Bawah Sultan Asikin (1753-1777), Suatu Penelitian Hubungan Politik dan Ekonomi antara Penguasa Pusat dengan Massa Pinggiran", *Tesis*, (Jakarta: UI, 1988), hlm. 27

penduduk, dan dikerjakan bersama-sama dan tidak ada pembagian sawah dan ladang secara perorangan. Pada bagian akhir tahun enam puluhan, masalah-masalah yang menyangkut pemilikan tanah dan sewa tanah bersumber pada hadiah-hadiah tanah yang diberikan kepada anggota-anggota kerabat sultan dan pejabat-pejabat negara, serta kepala lembaga-lembaga keagamaan, yang tanah-tanah miliknya terutama terletak di daerah inti kesultanan yang lama.<sup>16</sup>

Setelah VOC datang, soal kepemilikan tanah tetap menjadi hak sultan. Dalam menancapkannya kekuasaannya VOC berusaha untuk memonopoli perdagangan lada di Banten. Tahun 1808 Daendels menghapuskan tanah-tanah milik sultan serta wajib kerja bakti yang melekat pada tanah-tanah itu, lalu memungut seperlima bagian dari hasil panen sebagai wajib pajak tanah untuk seluruh daerah dataran rendah di Banten.

Merawat lada memang cukup sulit karena keuntungannya baru tampak kalau rantingnya mulai berbuah tiga tahun kemudian, dan secara relatif perkebunan lebih cepat mundur setelah melalui titik terbaik diantara tahun kedelapan dan kedua belas. Tidak semua daerah cocok untuk penanaman lada. Tanaman lada ini banyak mati akibat naiknya air laut dan memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun-tahun sebelumnya. Terutama yang terletak di sebelah barat perkebunan milik negara. Berbeda dengan di sebelah timur tanaman lada tumbuh subur dan berkualitas yang baik.

Ketika terjadi perubahan politik dan kemudian diikuti perubahan sistem pemerintahan, keadaan kesultanan pun menunjukkan dinamika yang tidak terlepas

---

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, *Op.cit.*, hlm. 58.

dari perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Di dalam struktur negara tradisional, kekuasaan sultanlah yang mempunyai prerogatif, baik dalam urusan politik maupun dalam urusan agama. Pada awal abad ke 19 para punggawa diangkat oleh sultan untuk mengepalai administrasi bagian-bagian kesultanan. Pada tingkatan birokrasi yang paling rendah, para lurah ditugaskan untuk mengawasi sejumlah rumah tangga. Tugas utama mereka adalah memungut pajak dan upeti serta memelihara ketertiban umum.

Setelah Kesultanan Banten dikuasai Belanda tahun 1808, sultan dan alat-alat politiknya dipertahankan akan tetapi ditempatkan di bawah pengawasan ketat Pemerintahan Belanda. Banten dinyatakan sebagai daerah kekuasaan Pemerintahan Belanda dan luas wilayahnya diperkecil. Sultan Banten diperbolehkan menggunakan gelar sultan, akan tetapi pada kenyataannya ia hanya merupakan semacam boneka saja, karena Banten sekarang sudah dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan Belanda.

Pada pertengahan tahun 1811 kekuasaan Daendels berakhir dan dilanjut oleh Raffles. Raffles yang menganut faham liberal adalah seorang tokoh yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara. Pada prinsipnya ia ingin menciptakan suatu sistem di Jawa yang bebas dari unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan wajib hasil bumi dan kerja paksa yang dijalankan kompeni dalam kerja sama antara raja-raja dan para bupati. Dalam prakteknya, banyak tindakan Raffles yang justru menyimpang dari konsepsinya, bahkan melanggar prinsip kemanusiaan dengan dalih untuk kepentingan negara.

Meskipun pemerintah kolonial menerapkan sistem pemerintahan modern dan berusaha mengurangi kekuasaan bupati, tetapi pemerintahan tradisional tetap berlangsung tanpa mengalami perubahan sistem pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, bupati tetap dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural terdiri atas patih, wedana (kepala distrik), asisten wedana, dan lurah. Pejabat fungsional terdiri atas jaksa kepala, penghulu kepala, mantri, kumuntil kepala (pemungut pajak).

#### E. Kesimpulan

Sejarah pembagian wilayah administratif Banten tidak lepas dari penjajahan kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa penjajahan Belanda di bawah pimpinan Daendels wilayah Banten di bagi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Hulu, Hilir dan Anyer. Maing-masing di bawah pengawasan prefektur. Setelah Belanda digantikan oleh Inggris, kekuasaan berpindah tangan ke Sir Thomas Stamford Raffles. Wilayah Banten oleh Sir Stamford Raffles dibagi menjadi 3 karesidenan atau kabupaten yaitu Banten Utara, Banten Barat, dan Banten Selatan pada tahun 1813.

Perdagangan di wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh penjajahan yang menduduki Indonesia. Diawali dengan pengaruh VOC terhadap perdagangan di wilayah Banten. Sistem perdagangan VOC yaitu menyesuaikan diri dengan pola dan sistem perdagangan yang berlaku di Indonesia. Di samping itu monopoli dan pungutan paksa, sejak 1620 VOC memberikan tanah yang telah dikuasainya

kepada orang-orang asing dengan imbalan harus menyeterkon sebagian hasilnya kepada VOC.

Perkebunan lada mengalami pasang surut yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor politik dan faktor geografis. Di beberapa wilayah Banten tidak cocok untuk ditanami lada. Hal tersebut dikarenakan naiknya air laut yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Hal tersebut terbukti dengan hasil perkebunan lada pada masa yang menurun sekitar 30 %. Daerah-daerah yang gagal ditanami lada kemudian oleh penguasa pada saat itu digantikan oleh tanaman kopi, dan beras yang juga menjadi salah satu komoditas internasional dari Banten.

Kemudahan produksi lada juga diakibatkan oleh kondisi politik di Kesultanan Banten. Kondisi politik di Kesultanan Banten dipengaruhi adanya kolonial yang menjajah wilayah Banten. Kedudukan kolonial di Indonesia juga mempengaruhi perkebunan lada di Banten. Perkebunan lada mulai memuncak dan mengalami kemajuan cukup pesat pada saat di Banten diduki oleh VOC. Hal tersebut berujung dengan dijadikannya lada sebagai komoditas utama oleh VOC.

### **Daftar Pustaka**

Guillot Claude, *Banten Sejarah Peradaban Abad X-XVII*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, Serang: Saudara, 1993.

Hoesein Djajadinngatan, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, Jakarta: Djambatan, 1983.

- Husin Sayuti, *Hubungan Lampung Dengan Kesultanan Banten dan Palembang Dalam Perspektif Sejarah 1500-1900*, Jakarta: PIDSN, 1985.
- Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, Cet I, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Pramudia Ananta Toer, *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*, Jakarta: Lentera Dipantara, 2006.
- Sartono Kartodirdjo *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Ery Soedewo, "Lada Si Eman Panas: Dampaknya Bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten", *Jurnal*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.
- Sri Ika Faika, "Peran Jawara Dalam Peristiwa Geger Cilegon di Banten Tahun 1870-1888", *Skripsi*, Yogyakarta UNY, 2005.

Yogyakarta, Oktober 2015

Pembimbing

Reviewer



Miftahudin, M.hum.  
NIP. 19740302 200312 1 006



Mudji Hartono, M.hum  
NIP. 19550115 198403 1 001